

***Implementation of the Stunting Reduction Policy in Tewah District,  
Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province***

**Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Tewah  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah**

**Ricky Abner Singarimbun<sup>1</sup>, Mani Festati Broto<sup>2</sup>, Siti Nuraini<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana  
Universitas Terbuka

<sup>1</sup>singarimbunricky@gmail.com, <sup>2</sup>mani@ecampus.ut.ac.id,

<sup>3</sup>sitinurainiwahyu@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of stunting reduction policies in Tewah District, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province, as well as to identify the inhibiting factors and efforts made to address them. Using a qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation involving health workers, Posyandu cadres, and the community. The analysis refers to George C. Edward III's implementation model, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has not yet been optimal. Communication issues arise from uneven and inconsistent information dissemination, especially in remote areas. In terms of resources, a shortage of trained health personnel and inadequate facilities are major obstacles. While health workers demonstrate strong commitment, their motivation is often hindered by poor working conditions. Furthermore, a complex bureaucratic structure and weak intersectoral coordination slow down the achievement of program targets. Efforts that have been made include regular cadre training, strengthening intersectoral communication, and increasing public awareness of balanced nutrition. Community-based approaches and supplementary feeding programs for toddlers and pregnant women have also been introduced. In conclusion, although there has been progress, the implementation of stunting reduction policies still faces significant challenges that require urgent attention to effectively meet national targets.*

**Keywords:** Policy Implementation, Stunting, Tewah District, George C. Edward III.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penanganannya. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Masalah komunikasi muncul dalam bentuk penyampaian informasi yang kurang merata dan tidak konsisten, terutama di wilayah terpencil. Dari sisi sumber daya, keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana menjadi kendala utama. Sementara itu, meskipun ada komitmen dari petugas kesehatan, motivasi mereka kerap terhambat oleh kondisi kerja yang tidak mendukung. Struktur birokrasi yang kompleks dan lemahnya koordinasi antar sektor juga memperlambat pencapaian target program. Upaya yang telah dilakukan antara lain pelatihan kader, penguatan komunikasi lintas sektor, serta sosialisasi gizi seimbang kepada masyarakat. Program pemberian makanan tambahan dan pendekatan berbasis komunitas juga mulai diterapkan. Kesimpulannya, meskipun terdapat kemajuan, implementasi kebijakan penurunan stunting masih menghadapi tantangan signifikan yang perlu segera ditangani untuk mencapai target nasional secara efektif.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Stunting, Kecamatan Tewah, George C. Edward III.

## **1. Pendahuluan**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang salah satunya diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Namun demikian, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan masih menjadi tantangan mendasar, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Rasio jumlah dokter di Indonesia yang hanya 0,69 per 1.000 penduduk masih berada jauh di bawah standar World Health Organization (WHO) sebesar 1:1.000, sehingga menimbulkan beban pelayanan yang berat di berbagai daerah (Amelia & Santoso, 2024).

Ketimpangan ini memberikan dampak langsung terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Meskipun pemerintah telah menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga di bawah 14% melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting nasional masih berada pada angka 21,6%, melebihi ambang batas WHO sebesar 20% (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Faktor-faktor seperti rendahnya pengetahuan gizi, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung menjadi penyebab utama tidak tercapainya target (Permatasari et al., 2023). Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas menempati posisi dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2021 sebesar 35,9%, meskipun sempat menurun menjadi 17,9% pada tahun 2022. Namun, disparitas antar kecamatan masih terjadi. Kecamatan Tewah, misalnya, mengalami kenaikan jumlah kasus stunting dari 139 balita (21,7%) pada 2021 menjadi 296 balita (23%) pada 2022. Beberapa studi menegaskan bahwa kondisi geografis yang sulit dijangkau, rendahnya pendapatan, serta minimnya pengetahuan gizi dan pola asuh yang kurang tepat memperburuk situasi tersebut (Muhammad et al., 2022; Nurwati et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, komunikasi lintas sektor, dan budaya kerja yang mendukung (Jeverson Taluke et al., 2021; Hafulyon et al., 2021). Meskipun demikian, studi yang secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan di tingkat kecamatan dalam konteks geografis terpencil seperti Tewah masih sangat terbatas.

Artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan analitis berbasis model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan fokus pada dinamika lokal di Kecamatan Tewah, artikel ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai hambatan implementasi kebijakan stunting di wilayah tertinggal, serta memberikan rekomendasi berbasis kontekstual yang dapat diaplikasikan di daerah dengan karakteristik serupa.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya; dan (3) merumuskan strategi yang telah dan dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan efektivitas program secara menyeluruh.

## **2. Kajian Pustaka Implementasi Kebijakan**

**a. Definisi Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang berfokus pada pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan berbagai kegiatan atau program untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan dalam rangka menangani permasalahan di masyarakat (Pratama, 2021). Dalam pelaksanaannya, implementasi tidak terlepas dari peran organisasi dan administrasi sebagai landasan utama, serta dipengaruhi oleh konteks, karakter individu, aliansi, dan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan (Rahmat et al., 2022). Dengan demikian, implementasi kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif (Gunawan, 2020).

Lebih lanjut, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dalam rangka merealisasikan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan (Alfian, 2022). Proses ini tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan membutuhkan keterlibatan kelompok sasaran kebijakan serta dukungan kapasitas yang memadai, baik dari segi rasionalitas maupun pengendalian emosional. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh beberapa prasyarat, antara lain kondisi eksternal yang mendukung, ketersediaan sumber daya, kejelasan hubungan kausal dalam kebijakan, tingkat ketergantungan antaraktor yang rendah, serta adanya pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan kebijakan (Elih, 2020). Dalam menganalisis implementasi kebijakan, salah satu model yang sering digunakan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, model Edward III dinilai relevan untuk digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

**b. Model Edward III dalam Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana komunikasi dilakukan, bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana sikap pelaksana (disposisi), serta bagaimana struktur birokrasi dibentuk dan dijalankan (Julianto et al., 2021).

Komunikasi menjadi faktor utama dalam implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana. Komunikasi yang efektif ditandai dengan kejelasan informasi, konsistensi perintah, serta penyaluran informasi yang tepat. Selanjutnya, disposisi atau sikap pelaksana juga berperan penting, yang mencakup komitmen, tanggung jawab, serta kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas yang diberikan. Selain itu, struktur birokrasi yang baik akan mendukung koordinasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui adanya standar operasional prosedur, pembagian tugas yang jelas, serta standar kerja yang terukur. Terakhir, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, informasi, kewenangan, maupun fasilitas, menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, keempat variabel tersebut menjadi indikator penting dalam menganalisis implementasi kebijakan penurunan stunting serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Stunting**

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya berdasarkan ukuran dari World Health Organization, yaitu berada di bawah minus dua standar deviasi median (Svefors et al., 2019). Stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan, serta kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan anak setelah lahir (Budiastutik & Rahfiludin, 2019).

Dampak stunting sangat luas, mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari sisi kesehatan, anak yang mengalami stunting cenderung memiliki pertumbuhan fisik yang terhambat serta perkembangan kognitif yang tidak optimal (Sutrio & Lupiana, 2019). Dari aspek sosial, kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan diri anak dan interaksi sosialnya. Sementara itu, dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan (Trisasmita et al., 2020; Windasari et al., 2020).

Penyebab stunting umumnya berkaitan dengan kekurangan gizi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak, serta adanya infeksi yang berulang. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kondisi sosial ekonomi keluarga, sanitasi lingkungan, serta rendahnya akses terhadap layanan kesehatan (Rustiyani & Susilo, 2020). Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi stunting, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan berbagai sektor dalam pelaksanaannya. Upaya penanganan dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta didukung oleh program-program lintas sektor yang berfokus pada peningkatan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Muthia et al., 2020).

#### **1. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Tewah**

Keadaan sosial ekonomi merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan (Nurwati et al., 2021; Jeverson Taluke et al., 2021). Dalam konteks Kecamatan Tewah, kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh faktor geografis yang relatif terpencil, sehingga berdampak pada keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, keterbatasan akses pasar dan infrastruktur menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menerima perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan.

## 2. Korelasi Budaya Kerja dan Kinerja Pegawai

Budaya kerja memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Budaya kerja mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi pedoman dalam bekerja serta memengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja (Budiyanto & Mochklas, 2021). Budaya kerja yang positif dapat mendorong pegawai untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan semangat tinggi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hafulyon et al. (2021), budaya kerja merupakan cara pandang dan sikap yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini, yang kemudian mendorong individu untuk mencapai kinerja terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, di mana lingkungan kerja yang kondusif dan nilai kerja yang positif dapat meningkatkan produktivitas secara individu maupun organisasi (Hakim et al., 2022). Selain itu, penerapan budaya kerja yang baik, seperti disiplin dan kepercayaan diri, juga terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan (Motivasi Kerja et al., 2019).

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap dinamika sosial dan proses kebijakan secara langsung di lapangan, sejalan dengan pandangan Basri (2018) yang menekankan pentingnya memahami makna di balik fenomena sosial.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Tewah karena daerah ini menunjukkan angka stunting yang cukup tinggi dan telah menjadi fokus intervensi kebijakan pemerintah daerah. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, yaitu dengan memilih individu yang dianggap memiliki informasi relevan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penurunan stunting. Informan terdiri dari penyuluh keluarga berencana, tenaga gizi puskesmas, kader Posyandu, serta ibu yang memiliki anak balita stunting.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali perspektif para pelaku kebijakan dan penerima manfaat. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan secara nyata, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan resmi, data statistik, dan dokumen kebijakan terkait. Selain itu, kuesioner daring disebarluaskan secara terbatas melalui media sosial sebagai pelengkap perspektif masyarakat terhadap kebijakan penurunan stunting di daerah tersebut.

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara, lembar observasi, serta perangkat bantu seperti perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta verifikasi ulang dengan informan kunci atau member check. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi selama proses berlangsung. Untuk menjaga keandalan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti juga menerapkan pencatatan reflektif dan audit trail selama kegiatan penelitian dilakukan.

#### **4. Hasil Dan Pembahasan**

##### **Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah**

Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Tewah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Keempat aspek ini saling berinteraksi dan menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, ditemukan bahwa implementasi kebijakan berjalan dalam koridor regulasi, tetapi menghadapi tantangan besar terutama pada dimensi komunikasi, sumber daya, dan birokrasi.

##### **a. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi kebijakan penurunan stunting telah diatur secara normatif melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021, serta didukung oleh SOP teknis dan pelatihan bagi pelaksana di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, struktur birokrasi telah memenuhi syarat sebagai kerangka kerja yang sistematis. Namun demikian, birokrasi yang terlalu berlapis menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Proses pelaporan dan pengumpulan data stunting, misalnya, mengalami keterlambatan karena tumpang tindih kewenangan antara instansi pusat dan daerah, serta lemahnya integrasi data antar sektor. Lambatnya alur koordinasi ini berdampak pada keterlambatan intervensi dan pengambilan kebijakan yang bersifat responsif.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi dapat menghambat kelincahan implementasi, sebagaimana dinyatakan oleh Handayani (2023) bahwa efektivitas birokrasi sangat tergantung pada kapasitas pelaksana dan interpretasi mereka terhadap aturan yang ada. Hal ini diperparah oleh kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi secara digital antar instansi. Dengan demikian, meskipun struktur birokrasi sudah terbangun, implementasinya belum sepenuhnya efisien karena belum dilengkapi dengan mekanisme koordinasi yang adaptif.

##### **b. Komunikasi**

Komunikasi menjadi aspek yang paling menonjol sebagai tantangan implementasi di Kecamatan Tewah. Berdasarkan hasil wawancara, transmisi informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana lapangan dan masyarakat masih belum merata dan tidak konsisten. Sosialisasi memang telah dilakukan melalui Posyandu dan sekolah, namun belum menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, informasi yang diberikan tidak selalu akurat dan mudah dipahami. Beberapa ibu hamil mengaku menerima informasi yang membingungkan dari berbagai sumber, baik dari petugas kesehatan maupun media sosial. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola makan sehat. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hambatan dalam dimensi komunikasi terkait tiga aspek utama menurut Edward III: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, kurangnya jangkauan informasi membuat pesan kebijakan tidak sampai ke semua lapisan masyarakat. Penyuluhan perlu dilakukan secara lebih intensif dan inovatif, seperti menggunakan radio lokal, mobile unit edukasi, atau pendekatan door-to-door yang lebih personal.

Pada aspek kejelasan, materi sosialisasi masih menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan bahasa dan penggunaan media visual yang lebih komunikatif agar pesan tersampaikan dengan efektif. Ini sejalan dengan temuan Fajarwati et al. (2022) yang menekankan pentingnya kejelasan pesan dalam kebijakan publik agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Sedangkan pada aspek konsistensi, komunikasi harus dilakukan secara berkala dan seragam oleh seluruh lini pelaksana. Ketidakkonsistenan informasi antara petugas dan media sosial menyebabkan masyarakat bingung dan tidak tahu harus mengikuti yang mana. Temuan ini memperkuat pendapat Agustino (2017) dan Asmawati (2020), bahwa komunikasi yang tidak efektif berkontribusi besar terhadap kegagalan implementasi kebijakan.

**c. Sumber Daya**

Sumber daya yang mencakup anggaran, alat, dan tenaga kerja juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan. Di satu sisi, ketersediaan alat ukur seperti antropometri dan makanan tambahan sudah cukup tersedia. Namun, dari sisi sumber daya manusia, seringnya rotasi kader dan terbatasnya pelatihan menyebabkan kurangnya kontinuitas dan kompetensi pelaksana. Ini berdampak pada kualitas penyuluhan dan pencatatan data di lapangan.

Penelitian Nirmala et al. (2024) dan Yalia (2014) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya. Di Kecamatan Tewah, kader yang sudah berpengalaman sering kali dipindahkan, dan penggantinya tidak dibekali pelatihan yang memadai. Akibatnya, kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan dan melakukan intervensi menjadi terbatas. Masalah ini juga muncul dalam penelitian Pakaya et al. (2023), yang menyebutkan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sering terkendala oleh rotasi tenaga kesehatan dan kurangnya pelatihan berkelanjutan.

**d. Disposisi**

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. Petugas kesehatan di Kecamatan Tewah umumnya menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi terhadap penurunan stunting, seperti ditunjukkan oleh partisipasi aktif dalam pelatihan berkala dan evaluasi program. Namun, motivasi dan integritas petugas bisa menurun ketika mereka menghadapi kendala struktural seperti kekurangan tenaga dan insentif yang tidak memadai. Disposisi yang positif merupakan modal sosial yang berharga dalam implementasi kebijakan. Menurut Rahadian (2007) dan Melleng (2007), disposisi mencakup kejujuran, motivasi, dan penafsiran terhadap kebijakan. Jika pelaksana tidak memahami secara penuh tujuan dan urgensi dari kebijakan, maka akan sulit bagi mereka untuk menanamkan pesan yang kuat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya harus bersifat teknis, tetapi juga membangun motivasi dan nilai-nilai pelayanan publik.

**e. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya**

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Basri & Rahayu (2020) serta Dewi & Lestari (2019) yang mengidentifikasi komunikasi dan sumber daya sebagai faktor krusial dalam penurunan stunting. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi struktural birokrasi dan disposisi yang lebih terperinci serta menunjukkan bagaimana interaksi antar variabel tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks ini, Kecamatan Tewah merepresentasikan tantangan yang umum dihadapi oleh daerah terpencil dalam implementasi kebijakan nasional.

## **Faktor-Faktor yang Menghambat Keberhasilan Penurunan Stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan penurunan stunting telah dirancang secara komprehensif dan berbasis regulasi nasional, pelaksanaannya di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Tewah, menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Hambatan-hambatan tersebut mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, terbatasnya sosialisasi, struktur birokrasi yang tidak fleksibel, serta rendahnya disposisi atau motivasi dari pelaksana di lapangan.

### **a. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga**

Salah satu temuan paling menonjol adalah lemahnya koordinasi antara lembaga pelaksana kebijakan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan dan pelaporan data stunting serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program intervensi. Hal ini diperkuat oleh Dewi & Lestari (2019) yang menyebutkan bahwa koordinasi yang buruk antar sektor menghambat implementasi kebijakan, terutama dalam konteks kebijakan multisektor seperti penanggulangan stunting. Secara teoritis, hambatan ini dapat dianalisis melalui model jaringan kebijakan (policy network), yang menekankan pentingnya interaksi dan kolaborasi antar aktor dalam suatu sistem kebijakan publik. Jika relasi antara aktor-aktor ini lemah atau bersifat silo, maka proses pelaksanaan kebijakan akan cenderung berjalan parsial dan tidak menyatu, sebagaimana terjadi di Kecamatan Tewah. Ketidakhadiran forum komunikasi terpadu antar lembaga menjadi salah satu penyebab utama kegagalan integrasi data dan aksi.

### **b. Minimnya Sumber Daya Manusia dan Fasilitas**

Faktor kedua yang dominan adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, maupun fasilitas layanan dasar. Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa banyak Puskesmas dan Posyandu di wilayah ini kekurangan tenaga medis terlatih, serta memiliki keterbatasan dalam alat bantu pemantauan tumbuh kembang anak, seperti antropometri.

Temuan ini sejalan dengan Basri & Rahayu (2020), Farida & Permatasari & Eprilianto (2023), dan Edyanto et al. (2021), yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan tidak optimal tanpa dukungan sumber daya manusia dan material yang mencukupi. Menurut R. Bin dan Ifnaldi (2019), ketiga elemen utama keberhasilan kebijakan public SDM, materi, dan metode harus terpenuhi secara proporsional. Ketika salah satu komponen melemah, efektivitas program pun ikut menurun.

Selain itu, pelatihan kader yang tidak berkelanjutan menyebabkan rendahnya kemampuan kader dalam memberikan edukasi dan intervensi yang tepat. Rotasi kader yang tinggi, terutama saat pandemi COVID-19, memperburuk kondisi karena diperlukan waktu adaptasi dan pelatihan ulang yang tidak sebentar. Akibatnya, kualitas layanan menjadi inkonsisten dari waktu ke waktu.

### **c. Sosialisasi yang Tidak Merata dan Tidak Efektif**

Sosialisasi kebijakan menjadi komponen penting dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap isu stunting. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa

informasi mengenai stunting belum tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Beberapa responden, seperti Supiyati (ibu dari balita stunting), mengaku belum pernah menerima penyuluhan langsung mengenai pentingnya gizi dan pencegahan stunting.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik yang digunakan belum inklusif dan belum mempertimbangkan konteks geografis dan budaya lokal. Ketidaksesuaian pendekatan sosialisasi ini membuat informasi tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Menurut teori *diffusion of innovations* dari Rogers, keberhasilan penyebaran kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan agen perubahan dalam menyesuaikan pendekatan mereka dengan karakteristik target penerima pesan.

Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Kadir & Siregar (2020), Iskandar & Yulianti (2021), dan Amalia & Wahyuni (2020) juga mencatat bahwa sosialisasi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting.

**d. Struktur Birokrasi yang Rumit dan Tidak Adaptif**

Struktur birokrasi yang terlalu kaku menjadi hambatan berikutnya. Seringnya pergantian kader atau petugas tanpa perencanaan yang matang menyebabkan proses adaptasi yang panjang. Meskipun pelatihan sudah dilakukan, efektivitas pelatihan tersebut tidak optimal karena tidak dibarengi dengan pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Ini mengakibatkan fluktuasi dalam kualitas pelaksanaan program dari satu periode ke periode berikutnya.

Menurut Susiyanti et al. (2024), struktur birokrasi yang berorientasi prosedural tanpa fleksibilitas pelaksanaan akan menyulitkan pelaksana kebijakan dalam merespons perubahan dinamis di lapangan. Temuan serupa juga ditemukan dalam konteks implementasi di wilayah lain, di mana peran pelaksana di lapangan sering terkendala oleh sistem yang terlalu sentralistik dan tidak adaptif terhadap kondisi lokal.

**e. Disposisi atau Sikap Pelaksana Kebijakan**

Disposisi, atau sikap dari para pelaksana kebijakan terhadap program yang mereka jalankan, menjadi faktor terakhir namun tak kalah penting. Petugas kesehatan di Kecamatan Tewah, meskipun memiliki pemahaman tentang pentingnya penurunan stunting, sering kali terbebani oleh kondisi kerja yang tidak mendukung, seperti beban kerja tinggi, kurangnya penghargaan atau insentif, serta minimnya supervisi yang membangun.

Muliawan & Suwandi (2020) menegaskan bahwa motivasi kerja yang rendah dapat menurunkan kualitas pelayanan dan mengurangi komitmen pelaksana terhadap program. Dalam teori implementasi Edward III, disposisi mencakup komitmen, kejujuran, dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Jika pelaksana tidak memiliki semangat atau tidak merasa memiliki program, maka keberhasilan implementasi akan sulit dicapai.

**Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penurunan Stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah**

Upaya penurunan stunting di Kecamatan Tewah menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun struktural. Namun, melalui pendekatan yang

terencana dan kolaboratif, sejumlah langkah strategis telah diimplementasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berikut adalah upaya-upaya utama yang dilakukan:

**a. Implementasi Pendekatan UKP dan UKM oleh Puskesmas**

Puskesmas Kecamatan Tewah, di bawah pimpinan Dewi Ayuwindari, S.Gz., menerapkan pendekatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam menangani kasus stunting. Pendekatan ini mencakup pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah kepada anak sekolah dan ibu hamil, serta kegiatan penyuluhan gizi secara rutin. Menurut Ayuwindari (2023), pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi individu sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik.

**b. Koordinasi Lintas Sektor untuk Pembaruan Data dan Pemantauan**

Untuk memastikan data stunting selalu terupdate dan tepat sasaran, Puskesmas Kecamatan Tewah terus memperkuat koordinasi lintas sektor antara Puskesmas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdasarkan data yang akurat. Suntrio & Lupiana (2019) menekankan bahwa koordinasi antar lembaga sangat penting dalam memastikan keberhasilan program stunting.

**c. Pelatihan Berkala untuk Mengatasi Rotasi Kader**

Rotasi kader yang terjadi secara terus-menerus menjadi salah satu hambatan utama dalam penurunan stunting. Untuk mengatasi masalah ini, Puskesmas Kecamatan Tewah melaksanakan pelatihan tambahan dan pelatihan ulang secara berkala. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kader-kader baru siap menjalankan tugasnya dengan baik. Basri & Rahayu (2020) mencatat bahwa pelatihan ini sangat penting, mengingat kader adalah ujung tombak dalam kegiatan Posyandu yang mencakup pendaftaran, penimbangan, pencatatan, dan pemberian penyuluhan.

**d. Kemitraan dengan Kader Posyandu untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan**

Selain pelatihan, Puskesmas Kecamatan Tewah juga menjalin kemitraan dengan kader Posyandu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan. Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Allyreza & Jumiati (2023) menyarankan bahwa menjalin kemitraan dengan kader Posyandu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan, sehingga upaya penurunan angka stunting dapat dilaksanakan secara optimal.

**e. Edukasi Gizi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Edukasi gizi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penurunan stunting. Ibu-ibu dengan anak balita stunting menyatakan bahwa edukasi yang mereka terima dari Puskesmas sangat membantu dalam memahami pentingnya gizi untuk mencegah stunting (Amalia & Wahyuni, 2020). Namun, kesadaran gizi di kalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah terpencil di Kecamatan Tewah. Purba (2019) menyatakan bahwa meskipun program edukasi sudah diterapkan dengan baik, masih ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang tepat.

**f. Peran Aktif Kader Posyandu dalam Edukasi Gizi**

Pentingnya partisipasi kader Posyandu sangat berpengaruh terhadap efektivitas edukasi yang diterima masyarakat. Kader yang aktif berperan dalam tindakan komunikatif sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima dan memahami informasi terkait gizi (Setyowati, 2019). Edukasi yang diberikan juga menjadi faktor utama dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang pencegahan stunting, yang pada gilirannya membantu memperbaiki status gizi anak-anak di wilayah tersebut.

#### **g. Koordinasi Lintas Sektor dan Intervensi Gizi Sensitif**

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari Dian Rosa Sunaryo et al. (2021) di Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa upaya lintas sektor dan intervensi gizi sensitif serta spesifik dapat efektif dalam menurunkan angka stunting di daerah-daerah yang memiliki kendala sumber daya. Oleh karena itu, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memperkuat kapasitas kader kesehatan adalah langkah penting yang dapat membantu mengatasi hambatan dalam penurunan angka stunting di Kecamatan Tewah.

### **5. Simpulan**

Penurunan stunting di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, menunjukkan efektivitas yang memadai meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III, ditemukan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Meskipun terdapat kendala terkait transmisi informasi yang tidak merata, keterbatasan kader kesehatan, serta kompleksitas birokrasi, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti pelatihan rutin kader dan peningkatan koordinasi antar sektor, menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penurunan stunting. Keberhasilan program ini bergantung pada konsistensi pelaksana dan peran aktif masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut. Ke depan, penguatan komunikasi dan sumber daya serta penyederhanaan prosedur birokrasi perlu menjadi perhatian untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

### **6. Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Alfian. (2022). *Implementasi kebijakan publik dalam perspektif organisasi*.
- Allyreza, R., & Jumiati, I. E. (2023). Strategi komunikasi kader posyandu sebagai upaya perubahan perilaku keluarga (ibu) dalam penurunan stunting di Desa Ramaya Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–14.
- Amalia, D., & Wahyuni, R. (2020). Peran posyandu dalam penurunan angka stunting di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 34–45.
- Asmawati, A. (2020). Implementasi kebijakan pemerintahan terhadap disiplin aparatur sipil negara pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 8–17.
- Ayuwulandari, D. (2023). Upaya kesehatan masyarakat dalam pencegahan stunting. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(3), 201–209.
- Basri, F., & Rahayu, T. (2020). Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kecamatan Kolaka. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(4), 47–55.

- Budiastutik, I., & Rahfiludin, M. Z. (2019). Faktor risiko stunting pada anak di negara berkembang.
- Budiyanto, & Mochklas, M. (2021). Kinerja pegawai dan budaya kerja.
- Dewi, R. A., & Lestari, W. (2019). Efektivitas sosialisasi program pencegahan stunting di puskesmas. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(3), 201–209.
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4).
- Elih. (2020). Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik.
- Gunawan. (2020). Analisis implementasi kebijakan publik.
- Hafulyon, H., Putra, M. D., Shobirin, K., & Elfisra, M. (2021). Pengaruh motivasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperindag Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).  
<https://doi.org/10.31958/mabis.v1i1.3086>
- Hakim, A., et al. (2022). Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai.
- Handayani, T. A. (2023). Dimensi disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan sistem kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 867–874.
- Iskandar, A., & Yulianti, S. (2021). Evaluasi implementasi program stunting di daerah rural Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 17(1), 61–72.
- Jeverson Taluke, O., Lesawengen, L., & Suwu, E. A. A. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap tingkat keberhasilan mahasiswa di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Holistik: Journal of Social and Culture*, 14(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/33777>
- Julianto, et al. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
- Melleng, A. S. (2007). Pengaruh implementasi kebijakan peternakan terhadap pendapatan peternak di Kota Tangerang Banten (Disertasi). Universitas Padjadjaran.
- Motivasi Kerja, et al. (2019). Pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan.
- Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). Implementasi program penanggulangan prevalensi stunting anak balita pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. *Journal Publicuho*, 5(2), 289–303.
- Muliawan, A., & Suwandi, S. (2020). Analisis faktor-faktor penghambat implementasi program stunting di Kabupaten Klaten. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(4), 31–45.
- Muthia, et al. (2020). Intervensi spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting.
- Nirmala, I., Purwanti, U., & Rosada, A. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 29–45.
- Nurwati, R. N., Listari, Z. P., Studi, P., Sosial, K., & Unpad, F. (2021). Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. *Share: Social Work Journal*, 11(1), 74–80.  
<https://doi.org/10.24198/share.v11i1.33642>
- Pakaya, Y., Kadir, S., & Kasim, V. N. A. (2023). Implementasi kebijakan intervensi gizi sensitif dalam penanganan stunting di Kabupaten Gorontalo. *Health*

- Information: *Jurnal Penelitian*, 15(2), e1244. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/1244>
- Permatasari, M. A., & Eprilianto, D. F. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam mencapai zero stunting di Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. *Publika*, 2637–2650.
- Pratama. (2021). Implementasi program dalam kebijakan publik.
- Rahadian, A. (2007). Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan kemandirian kelompok tani (Disertasi). Universitas Padjadjaran.
- Rahman. (2023). Model implementasi kebijakan publik perspektif Edward III.
- Rahmat, et al. (2022). Dinamika implementasi kebijakan dalam organisasi.
- Rustiyani, & Susilo. (2020). Faktor penyebab stunting pada ibu hamil.
- Setyowati, Y. (2019). Komunikasi pemberdayaan sebagai perspektif baru pengembangan pendidikan komunikasi pembangunan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 188–199. <https://doi.org/10.46937/17201926849>
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2021). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. *Responsive: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(4). <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>
- Susiyanti, S., Riadi, S., Kurnia, I., & Nuraisyah, N. (2024). Implementasi kebijakan pelayanan ibu hamil di Puskesmas Kamonji Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Syntax Imperatif*, 5(3), 404–418.
- Svefors, P., et al. (2019). Stunting in children: Global health perspective.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). Panduan konvergensi program/kegiatan percepatan pencegahan stunting: Buku pegangan resmi organisasi perangkat daerah (OPD). TNP2K.
- Trisasmita, et al. (2020). Dampak stunting terhadap perkembangan anak.
- Windasari, et al. (2020). Faktor risiko dan dampak stunting pada anak.